

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN POLISI  
KEHUTANAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA  
KEBAKARAN HUTAN  
(Studi pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 (S.H.)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

ELLEN AULIA  
NPM 1721020177



**Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'yyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN POLISI  
KEHUTANAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA  
KEBAKARAN HUTAN  
(Studi pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 (S.H.)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'yyah)

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**Pembimbing II : Hendriyadi, SHL, MHI**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Hutan adalah kekayaan negara yang tidak ternilai harganya, karena hutan mempunyai peranan yang cukup penting terhadap kehidupan di atas bumi ini. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hutan yang cukup luas. Namun, hutan yang ada di Provinsi Lampung mengalami kerusakan hutan yang cukup parah dan salah satunya disebabkan karena kebakaran hutan. Untuk meminimalisir kerusakan hutan yang akan terus terjadi dikarenakan kebakaran hutan, pemerintah merasa perlu untuk membentuk peraturan tentang perlindungan kehutanan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan. Dan dalam mewujudkan upaya perlindungan hutan dari kebakaran hutan, pentingnya peran polisi kehutanan terlibat dan melaksanakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan yang terjadi sebagaimana tugas polisi kehutanan sebagai pejabat kehutanan yang disebutkan dalam Undang-Undang Kehutanan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana peran polisi kehutanan Provinsi Lampung dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan? dan Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peran polisi kehutanan Provinsi Lampung dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan? Tujuan dari penelitian ini adalah, Untuk mengetahui peran polisi kehutanan Provinsi Lampung dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap peran polisi kehutanan Provinsi Lampung dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian memperoleh kesimpulan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa buku, dokumen, Peraturan perundang-undangan, wawancara, dan hasil dari penelitian.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran polisi kehutanan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Lampung bahwa polisi kehutanan sudah melakukan pencegahan

kebakaran hutan dengan baik dan optimal. Dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan polisi kehutanan melakukan penyuluhan, sosialisasi, pemasangan banner dan rambu-rambu spanduk, berdiskusi dengan tokoh masyarakat dan aparat desa, patroli rutin, koordinasi dengan kades canti dan Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan penjagaan malam hari dikawasan hutan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Dengan adanya peran dari polisi kehutanan dalam mencegah kebakaran hutan, hutan dapat terlindungi dan tetap lestari. Dan pandangan Hukum Islam terhadap peran polisi kehutanan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Lampung sudah sesuai dengan Hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah hal-hal yang buruk dan mewujudkan maslahat yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan di dunia.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ellen Aulia  
NPM : 1721020177  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam terhadap Peran Polisi Kehutanan dalam Mencegah Terjadinya Kebakaran Hutan (Studi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, April 2021

Penulis,

The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow rectangular official stamp. The stamp contains the text 'METABAT TEMPEL' and a unique identifier 'CFFAJX140622858'. To the left of the stamp, there is a vertical black bar with some illegible text.

Ellen Aulia

Npm 1721020177





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi :** Analisis Hukum Islam terhadap Peran Polisi  
Kehutanan dalam Mencegah Terjadinya  
Kebakaran Hutan (Studi Pada Dinas  
Kehutanan Provinsi Lampung  
**Nama :** Ellen Aulia  
**NPM :** 1721020177  
**Fakultas :** Syariah  
**Jurusan :** Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I,**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 196210221993031002**

**Pembimbing II**

**Hendriyadi, SHL., MHI**

**Ketua Jurusan,**

**Frenki, M.Si**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "**Analisis Hukum Islam terhadap Peran Polisi Kehutanan dalam Mencegah Terjadinya Kebakaran Hutan (Studi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)**" disusun oleh **Ellen Aulia NPM 1721020177** Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung, pada Senin, 21 Juni 2021

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.**

**Sekretaris : Kartika S, M.Pd**

**Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, M.H.**

**Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.**

**Penguji III : Hendriyadi, SHL, MHI**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP. 195210221993031002**



## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

(Q.S. Al-Anfal [8] : 27).





## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan ridho nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Solawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Amirsyah, SH dan ibunda Siti Amidah yang senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, semangat, dukungan baik secara moral, materi dan doa yang tiada henti untuk keberhasilan dan kebahagiaanku.
2. Kakakku tercinta Pertiwi Utami, Dwi Utari, Tri Wulandari dan adikku tersayang Panca Bagus Putra Ganta yang selalu memberi semangat sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah meneduhkan ku dan menambah wawasan dalam berpikir dan bertindak.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 10 Oktober 1999 dan diberi nama Ellen Aulia. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan bapak Amirsyah,SH dan ibu Siti Amidah.

Pada tahun 2004 penulis masuk TK Al-Azhar 6 Jatimulyo, kemudian pada tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Jatimulyo setelah menyelesaikan pendidikan dasar, kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 29 Bandar Lampung, kemudian pada tahun 2014 penulis kembali melanjutkan pendidikan di SMAN 5 Bandar Lampung .

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan kejenjang Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara).

Bandar Lampung, Maret 2021

Penulis,

Ellen Aulia

Npm 1721020177

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, ridho serta ilmu-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Analisis Hukum Islam terhadap Peran Polisi Kehutanan dalam Mencegah Terjadinya Kebakaran Hutan (Studi pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)” dengan baik. Solawat serta salam juga selalu penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan guna untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, kritik, saran, motivasi, fasilitas dan kesempatan yang diberikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan penyelesaian skripsi ini. Rasa hormat dan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. dan Bapak Hendriyadi, SHI., MHI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang luar biasa memberikan bantuan dan motivasinya dalam proses skripsi
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pengarahan selama proses perkuliahan
6. Kedua orangtua beserta kakak dan adik yang telah memberikan doa dan dukungannya selama proses pembuatan skripsi.

7. Kepala Dinas Kehutan Provinsi Lampung, Polisi Kehutan dan semua pegawai di Dinas Kehutan Provinsi Lampung yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian.
  8. Teruntuk partner terbaik M. Syah Putra yang selalu menemani dan memberikan dukungan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
  9. Seluruh teman tercinta Cindy Rizki Wulandari, Desi Setyawati, Nurhaifah, Merliana Fikriani, Putri Shelviana Sojja, Zellia Putri Hasti Pratiwi yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
  10. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data
  11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
  12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan dan pahala disisiNya, Amin Ya Robbalallamin.
- Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua. Amin.

Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas syariah juga dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

*Wassalamualaikum wr.wb.*

Bandar Lampung, Maret 2021  
Penulis,

Ellen Aulia  
Npm 1721020177



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Tinjauan Pustaka.....	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Perlindungan dan Pemeliharaan Hutan .....	19
1. Pengertian Hukum Islam .....	19
2. Ketentuan Perlindungan Hutan dalam Islam ...	19
3. Ketentuan Pemeliharaan Hutan dalam Islam ....	22
B. Pengertian Hutan dan Jenis-Jenis Hutan .....	24
1. Pengertian Hutan .....	24
2. Jenis-Jenis Hutan .....	27
C. Kebakaran Hutan .....	31
1. Pengertian Kebakaran Hutan .....	31
2. Faktor-Faktor Penyebab Kebakaran Hutan .....	34

3. Dampak yang ditimbulkan dari Kebakaran Hutan .....	36
4. Sanksi terhadap Pelaku Pembakaran Hutan.....	40
D. Perihal Polisi Kehutanan .....	46
1. Pengertian Polisi Kehutanan.....	46
2. Tugas dan Fungsi Polisi Kehutanan.....	48

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kawasan Hutan di Provinsi Lampung .....	51
1. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Lampung.....	51
2. Letak-letak Hutan di Provinsi Lampung.....	52
B. Potret Eksistensi Polisi Kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung .....	59
1. Jumlah Polisi Kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung .....	59
2. Tugas, Peran, dan Struktur Polisi Kehutanan....	61
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Polisi Kehutanan dalam Mencegah Kebakaran Hutan .....	64
1. Faktor Pendukung Peran Polisi Kehutanan dalam Mencegah terjadinya Kebakaran Hutan .	64
2. Faktor Penghambat Peran Polisi Kehutanan dalam Mencegah terjadinya Kebakaran Hutan .	69

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Peran Polisi Kehutanan dalam mencegah terjadinya kebakaran Hutan di Provinsi Lampung .	75
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Polisi Kehutanan dalam mencegah terjadinya kebakaran Hutan.....	78

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi .....	83

## **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Balasan Izin Reasearch
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Izin Dinas Penanaman Modal
- Lampiran 4 Surat Keterangan di Koreksi oleh Pembimbing
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 7 Dokumen Pendukung
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Cek Plagiat



## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Tabel Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) di Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 ..... 6
2. Tabel Rincian Luas Hutan di Provinsi Lampung ..... 54
3. Tabel Letak-Letak Hutan di Provinsi Lampung ..... 55
4. Tabel Sebaran Jumlah Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung ..... 58
5. Tabel Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA) di Provinsi Lampung ..... 65
6. Tabel Sarana dan Prasarana KARHUTLA Dinas Kehutanan ..... 68
7. Tabel Sarana dan Prasarana Satgas BRIGDALKARHUTLA Provinsi Lampung ..... 69





## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Struktur Organisasi Polisi Kehutanan di Dinas  
Kehutanan Provinsi Lampung 2021 ..... 62



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Judul skripsi ini adalah "Analisis Hukum Islam terhadap Peran Polisi Kehutanan dalam Mencegah Terjadinya Kebakaran Hutan (Studi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)".

Ada beberapa istilah dalam judul skripsi ini yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis Hukum Islam adalah aktivitas yang memuat tentang penguraian hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk hamba-NYA yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).<sup>1</sup>
2. Peran Polisi Kehutanan merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.<sup>2</sup> Dimana dalam hal ini polisi kehutanan merupakan pihak yang berkedudukan atau berwenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya yaitu perlindungan hasil hutan.
3. Mencegah kebakaran hutan adalah menahan agar tidak terjadi suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.<sup>3</sup>
4. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah

---

<sup>1</sup> Barzah Latupono, et. al. *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), h.5.

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h.213

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

Provinsi dan Kabupaten/kota di bidang kehutanan yang terletak di Provinsi Lampung.

Berdasarkan beberapa istilah yang dijelaskan di atas maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah sebuah kajian yang membahas tentang peran polisi kehutanan dan tinjauan hukum Islam terhadap mencegah kebakaran hutan di Provinsi Lampung.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Hutan<sup>4</sup> merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan bukan kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, social budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara kesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hutan yang cukup luas.<sup>5</sup> Namun, hutan yang ada di Provinsi Lampung mengalami kerusakan hutan yang cukup parah yang salah satunya disebabkan karena kebakaran hutan. Pada dasarnya, kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi karena dipengaruhi oleh 2 faktor.

Dua faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan ialah faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang

---

<sup>4</sup> Menurut ahli kehutanan, Hutan merupakan komunitas biologi dimana mayoritasnya terdiri atas pohon-pohon yang merupakan tanaman keras.

<sup>5</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Luas Hutan di Provinsi Lampung berjumlah 1.004. 735 ha.

tidak terkontrol. Faktor alami antara lain oleh pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman Kering merupakan bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batubara yang muncul dipermukaan ataupun dari pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak sengaja.<sup>6</sup> Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (*ground fire*) dan kebakaran permukaan (*surface fire*). Dua tipe kebakaran tersebut merusak semak belukar dan tumbuhan bawah hingga bahan organik yang berada di bawah lapisan serasah seperti humus, gambut, akar pohon ataupun kayu yang melapuk. Apabila lambat ditangani kebakaran dapat terjadi meluas sehingga menimbulkan kebakaran tajuk (*crown fire*) dimana kebakaran ini merusak tajuk pohon. Akan tetapi tipe kebakaran terakhir ini dapat terjadi juga karena adanya sembaran petir.

Faktor kegiatan manusia yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan antara lain adanya kegiatan pembuatan api unggun di dalam hutan, namun bara bekas api unggun tersebut tidak dipadamkan. Adanya kegiatan pembukaan lahan dengan teknik tebang-tebas-bakar yang tidak terkontrol, biasa dilakukan oleh perusahaan HTI dan peladang berpindah ataupun menetap. Pembakaran secara disengaja untuk mendapatkan lapangan penggembalan atau tempat berburu membuang puntung rokok yang menyala secara sembarangan serta akibat penggunaan peralatan atau mesin yang menyebabkan timbulnya api.<sup>7</sup>

Kebakaran hutan tersebut menimbulkan pencemaran kabut asap yang memiliki pengaruh negatif terhadap aspek ekonomi, ekologis, kesehatan, bahkan penyebaran kabut asap tersebut sampai ke negara lain yaitu Singapura dan

---

<sup>6</sup> Wignyo Adityoso, "Manajemen Bencana Pengantar & Isu-Isu Strategis", (Jakarta : Bumi Aksara , 2018) h.47

<sup>7</sup> Facmi Rasyid. Facmi Rasyid. "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan", tersedia di Jurnal Lingkar Widyaaiswara (diakses pada tanggal 25 Juni 2020)



Malaysia yang berdampak pada memburuknya hubungan bilateral dengan kedua negara tersebut karena kabut asap dengan bantuan angin dengan mudahnya terbang melenggang ke negara lain dan menjadi polusi udara lintas-batas.<sup>8</sup>

Dampak global dari kebakaran hutan dan lahan yang langsung dirasakan adalah pencemaran udara dari asap yang ditimbulkan mengakibatkan gangguan pernapasan dan mengganggu aktifitas sehari-hari. Dampak kebakaran yang sangat dirasakan manusia berupa kerugian ekonomis, yaitu hilangnya manfaat dari potensi hutan seperti tegakan pohon hutan yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan, serta satwa untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani dan rekreasi. Kerugian lain berupa kerugian ekologis yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, tidak tersedianya udara bersih yang dihasilkan vegetasi hutan serta hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah terjadinya erosi. Jika hutan terbakar maka beberapa fungsi hutan akan hilang sebagian atau hilang sama sekali sejalan dengan hilangnya pepohonan di dalam hutan.<sup>9</sup>

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki hutan yang cukup luas, persoalannya adalah hutan di Provinsi Lampung mengalami kebakaran hutan yang cukup serius. Hal itu terbukti masih marak terjadi kebakaran hutan di Provinsi Lampung pada beberapa tahun terakhir dan dapat terlihat melalui rekapitulasi data kebakaran hutan di Provinsi Lampung yang terjadi sejak tahun 2016-2019.

---

<sup>8</sup> Risma Sari Septianingrum, “*Dampak Kebakaran Hutan di Indonesia Tahun 2015 dalam kehidupan Masyarakat*” tersedia di <https://www.researchgate.net/publication/325215886> , diakses 24 Juni 2020

<sup>9</sup> Bambang Hero Saharjo, et. Al. “Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Komunitas Terdampak Asap”, (Bogor: IPB Press, 2018), h. 28

Berikut rekapitulasi luas kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) di Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 dihitung berdasarkan analisis Citra Satellite landsat 8 OLI/TIRS:

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)**  
**di Provinsi Lampung Tahun 2016-2019<sup>10</sup>**

No	Tahun	Luas Kebakaran dan Lahan (Ha)
1.	2016	3.201,24
2.	2017	6.1777,79
3.	2018	15.156,22
4.	2019	35.546,00

Sumber Data : SiPongi Karhutla Monitoring Sistem

Sedangkan disamping data rekapitulasi tersebut, peningkatan kasus kebakaran di Lampung terus terjadi berdasarkan data yang dilansir pada berita harian (LAMPOST.CO) Selasa, (14/01/2020). 2019 menjadi tahun wilayah Lampung yang cukup lama mengalami masa kemarau, dampaknya ada beberapa titik kawasan di wilayah Lampung mengalami kebakaran. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Wiyogo Supriyanto mengatakan Di Tahun 2019 ada 1.276 titik panas (*hotspot*) secara keseluruhan di Provinsi Lampung mengalami kebakaran, yakni dengan luas mencapai 2.607

---

<sup>10</sup> Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung, tersedia di sipongi.menlhk.go.id, diakses 24 juni 2020 waktu 21:46

hektare. Hal tersebut di akibatkan cuaca kering yang terjadi selama tahun 2019. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 2017 dan 2018, tingkat kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Lampung mencapai 3 kali lipat.<sup>11</sup> Jika kebakaran hutan terus menerus terjadi maka, sangat mungkin terjadi hutan di Provinsi Lampung akan semakin sedikit

Salah satu contoh kasus kebakaran hutan yang baru-baru ini terjadi di Lampung yaitu di Kecamatan Suoh, Lampung Barat menghabiskan sekitar 100 hektare tumbuhan ilalang, pada 8 September 2019. Lahan gambut itu berada disekitar danau asam yang masuk wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Api diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh oknum saat berkunjung ke lokasi tersebut.<sup>12</sup>

Untuk meminimalisir kerusakan hutan yang akan terus terjadi dikarenakan kebakaran hutan, pemerintah merasa perlu untuk membentuk peraturan tentang perlindungan kehutanan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan. Dan dalam mewujudkan upaya perlindungan hutan dari kebakaran hutan, pentingnya peran polisi kehutanan terlibat dan melaksanakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan yang terjadi sebagaimana tugas polisi kehutanan sebagai pejabat kehutanan yang disebutkan dalam Undang-Undang Kehutanan.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan. Pada pasal 4 ayat (1) Polisi Kehutanan memiliki tugas

---

<sup>11</sup> Berita Harian Lampost.  
<https://www.google.co.id/amp/s/m.lampost.co/amp/kebakaran-hutan-selama-kemarau-2019-capai-2-607-ha.html> diakses 24 juni 2020, diakses 21:46

<sup>12</sup>M.Tribunnews.<https://www.google.co.id/amp/s/m/tribunnews.com/amp/ki-las-daerah/2019/09/08/breaking-news-akibat-puntung-rokok-100-hektare-lahan-di-lampung-barat-terbakar>, diakses 24 juni 2020

perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar. Berdasarkan pasal tersebut polisi kehutanan memiliki peran dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan.

Polisi kehutanan telah diamanatkan untuk menjalankan tugas yang diberikan berdasarkan undang-undang. Dalam Islam diterangkan bahwa pemerintah tidak boleh mengkhianati amanah yang sudah dipercayakan.

Sebagaimana dalam firman Allah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”* (Q.S. Al-Anfal [8] : 27).<sup>13</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa kita harus menjaga dan memelihara amanat yang telah diberikan kepada kita. Begitupun dengan polisi kehutanan yang sudah diberikan amanah oleh negara melalui undang-undang. Sudah seharusnya polisi kehutanan menjalankan amanat tersebut sesuai dengan peraturan yang telah diamanatkan.

Berdasarkan uraian di atas oleh sebab itu membuat peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran polisi kehutanan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Lampung perspektif Hukum Islam.

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2007), h. 180



### C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

#### 1. Fokus Penelitian

Pembahasan yang akan diteliti lebih fokus pada pembahasan peran kedudukan dan kewenangan polisi kehutan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Lampung dan melihat bagaimana Hukum Islam dalam memandang peran kedudukan dan kewenangan polisi kehutan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Lampung.

#### 2. Sub-Fokus Penelitian

Adapun sub-fokus penelitian ini yaitu :

- a. Peran polisi kehutan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Lampung
- b. Faktor pendukung dan penghambat polisi kehutan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Lampung

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran polisi kehutan Provinsi Lampung dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peran polisi kehutan Provinsi Lampung dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan?

### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran polisi kehutan Provinsi Lampung dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap peran polisi kehutanan Provinsi Lampung dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan wawasan atau ilmu pengetahuan terkait analisis Hukum Islam terhadap peran polisi kehutanan dalam mencegah kebakaran hutan.
2. Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang berbeda.

## **G. Tinjauan Pustaka**

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jeni Fitria Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul, “Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam”.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Jeni Fitria, *Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2017)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam melarang perusakan hutan dengan cara membakar hutan. Perbuatan tersebut digolongkan sebagai tindak pidana (Jarimah) dan pelakunya akan dihukum. Bentuk hukuman yang lengkap adalah kekuatan penguasa (Ulilamri). Hakim memiliki kewenangan untuk menghukum atau menghukum pelaku pembakaran hutan. Hakim juga dapat berpegang pada prinsip kemaslahatan umat. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah keduanya membahas tentang kebakaran hutan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis membahas tentang peran polisi kehutanan dalam pencegahan kebakaran hutan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfatihah Amira Wi Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar pada tahun 2017 dalam Skripsinya yang berjudul “Analisis Kinerja Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan di Kabupaten Sinjai”<sup>15</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara administratif rencana kerja yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai telah memenuhi tugas pokok dan fungsi Kepolisian Resor Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75 / Menhut-II / 2014. Polisi kehutanan di Distrik Sinjai bekerja dengan baik di lapangan. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah keduanya membahas polisi kehutanan. Perbedaan antara penelitian ini dan penulis adalah penulis menggunakan pandangan hukum Islam untuk menganalisis peran polisi kehutanan.

---

<sup>15</sup>Nurfatihah Amira Wi, *Analisis Kinerja Polisi Hutan Dalam Perlindungan Hutan Di Kabupaten Sinjai*, (Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin Makasar: 2017)

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.<sup>16</sup> Di bawah ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>17</sup> Penulis akan terjun langsung ke lapangan dimana penulis akan meneliti peran polisi kehutanan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian memperoleh kesimpulan.<sup>18</sup> Berkaitan dengan Analisis Hukum Islam terhadap peran polisi kehutanan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Lampung.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna untuk

---

<sup>16</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Sukarame: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 19.

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h.33.

<sup>18</sup> Muhammad Abdul Khaidir, *Hukum dan Politik Hukum* (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), h. 126.

melakukan observasi.<sup>19</sup> Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer.<sup>20</sup> Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut data tersedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis mengamati objek-objek yang diteliti yang berada di Lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>22</sup> Wawancara dilakukan guna mengali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti sekretaris dinas kehutanan dan anggota polisi kehutanan.

---

<sup>19</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia 1985), h.29.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.44.

<sup>21</sup> Soeranto, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), h.55

<sup>22</sup> Zuriyah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h.179

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data yang bersifat "*nonbehavior*" dalam hal ini ialah data dokumen.<sup>23</sup> Data dokumen ini dapat berupa tulisan atau lukisan (gambar) dapat pula berupa benda-benda. Dalam hal ini penulis menggunakan metode dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

## 4. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi artinya jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diduga.<sup>24</sup> Populasi disini yaitu keseluruhan pimpinan dan pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang berjumlah seluruhnya 79 orang.

### b. Sampel

Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>25</sup> Purposive sampling adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 1 orang bidang pemetaan yang mempunyai data mengenai

---

<sup>23</sup> Soebardhy, et. al. *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur: CV Qlara Media, 2020)

<sup>24</sup> Djarwanto, *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Liberty (Yogyakarta:1984), h.42.

<sup>25</sup> Arkunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara,1991), h.102.



letak –letak hutan di Provinsi Lampung, 1 orang bidang kebakaran hutan yang mengetahui perkembangan kasus kebakaran hutan di Provinsi Lampung , 1 orang bidang penyuluhan hutan berperan melakukan penyuluhan kehutanan yang memiliki kerjasama dengan polisi kehutanan, dan 3 orang polisi kehutanan yang berperan dalam menyelenggarakan pengamanan hutan, penanggulangan gangguan hutan, penyuluhan kehutanan, dan tindak pidana kehutanan.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang didapat sudah cukup dalam penelitian skripsi ini, maka langkah selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan beberapa langkah berikut:

### a. Pemeriksaan data (editing)

Pemeriksaan data yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, lalu data tersebut dijabarkan dengan bahasa yang lugas dan mudah.

### b. Penandaan data (Coding)

Penandaan data yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature, atau dokumen) : pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) ; atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A, masalah kedua tanda B, dan seterusnya.)

### c. Sistematis Data (constructing dan systematizing)

Penyusunan atau sistematis data adalah pengelompokkan secara sistematis data yang sudah

diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.<sup>26</sup>

## 6. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabar kedalam unit-unit, melakukan intesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>27</sup>

Setelah data diperoleh dan terkumpul, selanjutnya dapat dianalisis secara Deskriptif . Deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti.

Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan dalam penelitian, penulis menggunakan cara berfikir *induktif*, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa khusus tersebut ditarik *generalisasi* yang umum.

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisahkan menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Abdul Khadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Cet ke-1, h.9

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.329

<sup>28</sup> Abdurrahman Soejono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h.13

## I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

### a. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

### b. BAB II Landasan teori

Bab kedua ini memuat uraian mengenai teori dan referensi yang menjadi landasan penunjang penelitian ini, meliputi pengertian hutan, jenis-jenis hutan, kebakaran hutan, perihal polisi kehutanan, dan ketentuan hukum Islam terhadap perlindungan dan pemeliharaan hutan.

### c. BAB III Deskripsi objek penelitian

Bab ketiga adalah hasil penelitian yang meliputi pemaparan data,

temuan penelitian terdiri dari gambaran umum kawasan hutan di Provinsi Lampung, potret eksistensi polisi kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, faktor pendukung dan penghambat peran polisi kehutanan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan.

### d. BAB IV Analisis penelitian

Bab keempat berisi mengenai pembahasan yang meliputi peran polisi kehutanan dalam mencegah

terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Lampung serta ketentuan hukum Islam terhadap peran polisi kehutanan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan.

e. BAB V Penutup

Bab kelima berisi kesimpulan dan rekomendasi.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Perlindungan dan Pemeliharaan Hutan**

##### **1. Pengertian Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan norma yang ketentuan-ketentuannya dari Allah SWT, maupun Nabi Muhammad SAW, yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk dipedomani oleh manusia (umat Islam) dalam menjalani kehidupan di dunia agar teratur guna mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat.

Joseph Schacht mendefinisikan hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah SWT, yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya yang terdiri atas hukum-hukum tentang ibadah, aturan-aturan politik, pidana, perdata, ataupun aturan-aturan hukum pada umumnya.

##### **2. Ketentuan Perlindungan Hutan dalam Islam**

Ketentuan mengenai menjaga dan melindungi hutan bukan hanya ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, di dalam Islam juga mengatur mengenai tata cara melindungi dan mengelola hutan. Islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, atau hubungan manusia dengan manusia saja, tetapi Islam mengatur mengenai hubungan manusia dengan alam. Hal ini berguna untuk terciptanya hubungan yang baik antara manusia dengan alam dan mewujudkan untuk saling memberi manfaat sehingga terjadinya lingkungan alam yang makmur.

Hukum Islam membuat aturan-aturan untuk melindungi hutan yaitu:

- a. Dilarang bagi siapapun untuk membangun gedung atau membuat lahan pertanian, membangun pabrik, dan sejenisnya di kawasan lindung ( *Hima Al-Mawat* ) . Jika tetap mendirikan maka ia harus pindah, dan bila masih tetap tidak mau untuk pindah kemudian pihak berwenang berhak untuk mengusirnya.
- b. Dilarang memanfaatkan hutan yang berlebihan, meskipun hutan sudah memperoleh izin untuk pemanfaatan kayu, namun tetap dilarang melakukan usaha yang dapat merusak ekosistem alam. Contohnya dengan cara pembakaran atau pembalakan liar menyebabkan hutan gundul. Dilarang menggunakan obat kimia yang berdampak pada pencemaran air dan udara. Oleh karena itu semua termasuk kedalam perbuatan *Ifsad Fi Al-Ardl* (berbuat kerusakan di muka bumi).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Asy-Syu'araa' ayat 183 Allah melarang manusia berbuat kerusakan :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

*"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; ." (Q.S. Asy-Syu'araa' [26] : 183).<sup>29</sup>*

Tafsir Hidayatul Insan bi Tafsirii Qur'an menafsirkan bahwa janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, Pada dasarnya prinsip hubungan antar manusia menurut Islam adalah tidak

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2007), h. 374



boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara apapun dan bidang apapun.<sup>30</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh melakukan perusakan di bumi. Karena alam semesta yang telah diciptakan Allah SWT memiliki banyak manfaat. Allah SWT telah menciptakan alam semesta yang amat sangat baik dan memiliki banyak manfaat oleh karena itu kita harus menjaganya. Perbuatan merusak hutan adalah bentuk kemaksiatan karena dapat Menyebabkan mudarat yang sangat besar bagi makhluk lain.<sup>31</sup>

Allah SWT dengan tegas melarang perbuatan merusak bumi, baik darat maupun lautan, karena dampak dari memanfaatkan alam tanpa menjaga ekosistem yang ada mengakibatkan terjadinya bencana-bencana yang sangat merugikan bagi manusia dan mengakibatkan kerusakan kepada lingkungan.<sup>32</sup>

Menurut Al-Qurthubi yang dikutip oleh Ahsin Sakho Muhammad bahwa larangan dalam ayat ini berlaku mutlak . Maksudnya ialah Allah SWT melarang manusia merusak alam, baik sedikit atau banyak.

- c. Larangan mengambil manfaat. Contohnya mengambil kayu untuk memenuhi kehidupan. Namun pengambilan kayu memiliki ukurannya, contohnya kayu yang diambil nilai komersialnya rendah, maka masih dapat diberikan toleransi.

---

<sup>30</sup> Jalaluddin as-Syuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2008),h.494

<sup>31</sup>Larangan Merusak Hutan dalam Perspektif Al-Qur'an, <https://kmnu.or.id/larangan-merusak-hutan-dalam-perspektif-al-qur/> (diakses pada 20 desember)

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah: *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", Volume 10, (Jakarta : Lentera Hati, 2002) h.405

### 3. Ketentuan Pemeliharaan Hutan dalam Islam

Berikut ini adalah beberapa ketentuan hukum Islam terpenting dalam pengelolaan hutan :<sup>33</sup>

- 1) Pengelolaan hutan hanya dilakukan oleh negara, bukan oleh pihak lain (seperti pihak swasta atau asing).

Pengelolaan hutan menurut hukum Islam hanya dapat dilakukan oleh negara (*khalifa*), karena pemanfaatan atau pengelolaan hutan tidak mudah untuk dilakukan secara langsung oleh perorangan dan membutuhkan banyak pengetahuan, sarana, dan dana yang cukup besar. Pemanfaatan hutan boleh dilakukan masyarakat dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan, dan tidak menghalangi hak orang lain untuk menggunakan hutan dan dalam pengawasan negara. Contoh pemanfaatan hutan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan harus dalam skala terbatas seperti mengambil ranting kayu, madu, buah-buahan, rotan, dan air dari hutan.

- 2) Dari segi kebijakan politik dan fiskal pengelolaan hutan bersifat sentralisasi, sedangkan dari segi administratif bersifat desentralisasi (ditangani oleh pemerintah provinsi atau daerah)

Untuk urusan kebijakan politik, seperti pengangkatan dirjen Kehutanan dan kebijakan keuangan (*maalayah*) berada ditangan khalifah yang berperan sebagai pemimpin pusat. Sementara urusan administrasi ditangani oleh pemerintah daerah (provinsi).

- 3) Negara memasukkan semua pendapatan hasil hutan ke Baitul Mal (kas negara), dan mendistribusikan dana

---

<sup>33</sup> Islam dan Ekologi, "Pengelolaan Hutan Berdasarkan Syariah", <http://agamadanekologi.blogspot.com/2007/03/pengelolaan-hutan-berdasarkan-syariah.html> (diakses 25 desember 2020)

sesuai dengan kepentingan masyarakat dalam koridor hukum Islam,

- 4) Untuk kepentingan khusus, negara dapat menerapkan kebijakan hima pada hutan tertentu.

Hima mengacu pada kebijakan negara dalam menggunakan kepemilikan publik untuk tujuan tertentu, seperti tujuan jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, negara bisa melakukan hima di hutan kalimantan, khusus untuk mendanai jihad fi sabilillah dan hasilnya tidak boleh digunakan untuk gaji pelayanan kehutanan, pembelian mesin, dan fasilitas kehutanan, atau tujuan lain selain untuk jihad fi sabilillah.<sup>34</sup>

- 5) Negara memiliki kewajiban untuk mengawasi hutan dan pengelolaan hutan. Fungsi pengawasan operasional di lapangan dijalankan oleh lembaga peradilan Muhtasib (*Qadhi Hisbah*) yang tugas utamanya adalah melindungi hak-hak seluruh masyarakat (termasuk pengelolaan hutan). Muhtasib misalnya menangani kasus pencurian kayu hutan, pembakaran, dan perusakan hutan. Muhtasib didampingi oleh seorang petugas polisi (*syurthah*) yang bertugas di bawah kepemimpinannya. Muhtasib dapat bersidang di lapangan, dan menjatuhkan vonis dilapangan (hutan). Sementara itu, fungsi pengawasan keuangan dijalankan oleh bagian pengawasan umum (*Diwan Muhasabah Amah*), yaitu merupakan bagian dari institusi Baitul Mal.

- 6) Negara berkewajiban untuk mencegah segala bahaya (*dharar*) atau kerusakan hutan. Dalam fiqih disebut, "*Adh-dlarar yuzal*", yang artinya segala kemudharatan atau bahaya harus dihilangkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, : "*Laa dharara wa laa dhiraara*." (Diriwayatkan oleh Ahmad & Ibn Majah),

---

<sup>34</sup> *Ibid*

yang berarti tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Negara juga harus melindungi hutan, melindungi keanekaragaman hayati, dan melakukan penelitian kehutanan.

- 7) Negara berhak memberikan sanksi ta'zir yang tegas kepada semua pihak yang merusak hutan, Mereka yang terlibat dalam penebangan liar, pembakaran hutan, penebangan di luar batas yang diizinkan, dan semua pelanggaran terkait hutan lainnya harus dikenakan sanksi ta'zir yang tegas oleh negara (peradilan). Ta'zir dapat berupa denda, cambuk, hukuman penjara atau bahkan kematian, tergantung pada tingkat bahaya dan kerusakan.

Pada prinsipnya, tindakan ta'zir harus memiliki efek jera, sehingga tidak terulangnya kejahatan perusakan hutan dan untuk melindungi hak semua masyarakat. Jenis dan tingkat sanksi ta'zir dapat ditentukan oleh Khalifa dalam Undang-Undang, atau ditentukan oleh Qadhi Hisbah jika Khalifa tidak mengadopsi peraturan ta'zir tertentu.

## **B. Pengertian Hutan dan Jenis-Jenis Hutan**

### **1. Pengertian Hutan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 Ayat (1), "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan".<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat (1).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan disebutkan bahwa, "Hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan".<sup>36</sup>

Hutan merupakan paru-paru dunia sebagai sumber penghasil oksigen alami untuk makhluk hidup di bumi. Hutan memegang peranan yang sangat penting bagi semua makhluk hidup termasuk manusia karena hutan adalah salah satu aspek terpenting dari biosfer. Hutan memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi kehidupan. Manfaat hutan ini dapat dibedakan atas dua macam yaitu langsung dan tidak langsung.<sup>37</sup> Manfaat hutan secara langsung yaitu manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, yaitu kayu, rotan, getah, buah-buahan dan madu. Sedangkan manfaat hutan secara tidak langsung yaitu manfaat yang tidak langsung dirasakan, tetapi yang dapat dirasakan yaitu keberadaan hutan itu sendiri. Seperti mencegah terjadinya erosi.

Menurut KBBI, pengertian hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon. Sumber daya hutan memiliki berbagai bentuk keunikan dan keindahan, sehingga hutan menyimpan kekayaan alam yang sangat

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Pasal 1 ayat (1).

<sup>37</sup> Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta : Sinar Grafika , 1997), h.38

beragam, yang keduanya berkaitan langsung dengan nilai ekonomi.<sup>38</sup> Ini juga terkait dengan nilai lingkungan.

Nilai kehidupan hutan yaitu:

- a. Hutan menghasilkan banyak kayu untuk kepentingan negara, wilayah, wilayah dan masyarakat,
- b. Hutan memungkinkan habitat hewan tertentu untuk bertahan hidup, dari komunitas mikroba hingga primata,
- c. Fungsi hutan adalah untuk mengatur tata air dan mata air, dimana air memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dari kayu,
- d. Hutan dapat mencegah terjadinya erosi tanah yang berlebihan, sehingga hutan memiliki nilai penting dalam mengatur kesuburan lahan pertanian di sekitarnya,
- e. Banyak barang dan jasa selain kayu yang diproduksi di hutan, seperti rotan, jamur, makanan, obat tradisional, pariwisata, dan sebagainya,
- f. Hutan merupakan penghasil oksigen yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk kemaslahatan umat manusia,
- g. Hutan dapat menyerap karbon bebas yang dapat membahayakan kehidupan manusia,
- h. Secara garis besar, hutan adalah semacam penopang kehidupan manusia,<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Baso Madiung, *Hukum Kehutanan Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hukum Berkelanjutan*, (Makassar : Celebes Media Perkasa , 2017), h.101

<sup>39</sup> San Afri Awang,. "*Politik kehutanan masyarakat*". (Yogyakarta: Center for Critical Social Studies & Kreasi Wacana Yogyakarta , 2003), h.101-102



## 2. Jenis-Jenis Hutan

Posisi Indonesia di khatulistiwa, menempatkan Indonesia di daerah tropis, artinya cuaca menjaga keseimbangan antara curah hujan dan kekeringan. Hal ini berdampak pada perkembangan tipe hutan di Indonesia. Hutan Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat banyak. Hal ini di mungkinkan karena dukungan lingkungan dan kondisi tanah yang cocok untuk perkembangan berbagai tumbuhan di Indonesia.

Jenis-jenis hutan digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu :

### a. Hutan berdasarkan statusnya

Hutan berdasarkan statusnya yaitu pengelompokan hutan berdasarkan keadaan (lokasi) antara orang, badan hukum, atau institusi yang mengelola, menggunakan, dan melindungi hutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak.

#### 1) Hutan negara berdasarkan pasal 1 ayat 4 UU NO. 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan yaitu "Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah".<sup>40</sup>

Hutan Negara meliputi beberapa yaitu :

- a) Hutan adat, adalah hutan nasional yang dialihkan kepada masyarakat hukum adat.
- b) Hutan desa adalah hutan milik negara yang dikelola oleh desa dan digunakan untuk kesejahteraan desa.

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat (4).

- c) Hutan kemasyarakatan, adalah sejenis hutan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

2) Hutan hak berdasarkan pasal 1 ayat 5 UU NO 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu "Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah".<sup>41</sup>

b. Hutan berdasarkan fungsinya

Hutan berdasarkan fungsinya yaitu pembagian hutan yang dikelompokkan dengan penggunaan hutan tersebut.

Hutan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi tiga yaitu :

1) Hutan Konservasi

Menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan. "Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya".<sup>42</sup>

Hutan konservasi digolongkan menjadi tiga macam yaitu :

- a) Kawasan hutan suaka alam berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan , yaitu "Hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan".<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (5)

<sup>42</sup> *Ibid*, Kehutanan, Pasal 1 ayat (9).

<sup>43</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (10).

- b) Kawasan hutan pelestarian alam berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu hutan dengan karakteristik tertentu, yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, melindungi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>44</sup>
- c) Taman buru yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

## 2) Hutan Lindung

Menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan disebutkan “Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah”.<sup>45</sup>

## 3) Hutan Produksi

Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan disebutkan “Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan”.

### c. Hutan berdasarkan tujuan khusus

Hutan berdasarkan tujuan khusus yaitu Hutan yang penetapan kawasan hutannya digunakan untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi dan

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (11).

<sup>45</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (8).

budaya. Dengan aturan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

d. Menurut Pasal 9 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan "Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota".

e. Hutan berdasarkan jenis pohonnya

Hutan berdasarkan jenis pohonnya dibagi menjadi beberapa yaitu:

- 1) Hutan heterogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh berbagai pohon, seperti hutan rimba.
- 2) Hutan homogen adalah hutan yang banyak ditumbuhi tumbuhan. Umumnya hutan homogen dibuat untuk tujuan tertentu. Contohnya untuk reboisasi, aforestasi, atau keperluan perluasan industri. Seperti hutan jati dan hutan pinus.<sup>46</sup>

f. Hutan berdasarkan iklimnya

Menurut iklimnya hutan dibedakan menjadi beberapa tipe, tipe-tipe hutan menurut iklimnya adalah sebagai berikut<sup>47</sup>:

1) Hutan Hujan Tropis

Hutan hujan tropis terletak di daerah tropis yang basah dengan curah hujan tinggi dan terbesar sepanjang tahun. Hutan hujan tropis terlihat berwarna hijau karena tumbuhan yang ada didalamnya merupakan tumbuhan hijau yang subur.

---

<sup>46</sup> Website resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng Sejahtera, mandiri, Integrasi, Iestari, Etika. <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/jenis-jenis-hutan-dan-fungsinya-60>, diakses 21 desember 2020

<sup>47</sup> Hutan Berdasarkan Iklimnya, tersedia di [ilmugeografi.com](http://ilmugeografi.com), diakses 21 desember 2020

## 2) Hutan Musim

Hutan musim yaitu tipe hutan yang kelangsungan hidupnya dipengaruhi oleh musim yang berlangsung di suatu daerah. Hutan musim ditumbuhi pepohonan yang dipengaruhi juga oleh musim. Memiliki ciri iklim hangat sepanjang tahun dan musim kemarau lebih panjang terjadi.

## 3) Hutan Sabana

Hutan Sabana yaitu hutan yang hanya memiliki rumput yang diselingi pepohonan dengan jumlah yang bervariasi dan jarak yang tidak beraturan. Memiliki ciri yaitu berada di wilayah beriklim tropis dan curah hujan musiman.

## 4) Stepa

Stepa yaitu wilayah semi gurun yang ditutupi oleh rerumputan. Memiliki ciri yaitu beriklim sedang, curah hujan yang tidak teratur, suhu pada saat siang hari yaitu panas sedangkan pada saat malam hari dingin.

## C. Kebakaran Hutan

### 1. Pengertian Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan didefinisikan sebagai proses reaksi cepat oksigen dan unsur-unsur lainnya, dan ditandai oleh panas, cahaya dan biasanya tersulut. Proses pembakaran menyebar bebas dengan bahan bakar berupa vegetasi makhluk hidup, tumbuhan mati, sampah, humus, semak belukar dan gulma.

Definisi kebakaran hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/ Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan yaitu "Suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan

kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungannya".<sup>48</sup>

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab musnahnya hutan yang dahsyat daya rusaknya. Kebakaran hutan sendiri merupakan penyebab terbesar laju deforestasi. Bahkan menurut organisasi lingkungan Dana Margasatwa Dunia, deforestasi akibat kebakaran hutan lebih besar daripada konversi pertanian dan pembalakan liar.<sup>49</sup> Kebakaran hutan merupakan suatu faktor lingkungan dari api yang menimbulkan pengaruh terhadap hutan.

Kebakaran hutan adalah peristiwa pembakaran yang menyebar dengan bebas dan mengkonsumsi bahan bakar alam di dalam hutan. Bahan bakar di hutan yaitu sampah, rumput, ranting atau cabang, pohon mati yang masih berdiri, batang, tunggak pohon, semak belukar, daun dan pohon lainnya.<sup>50</sup>

Secara garis besar kebakaran hutan terbagi beberapa macam, yaitu:

#### a. Pembakaran Terkendali

Pembakaran terkendali adalah pembakaran terkontrol dalam kondisi cuaca tertentu, yang memungkinkan api diarahkan ke kondisi tertentu sekaligus menghasilkan panas dan laju perambatan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Dalam hal ini api merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk tujuan positif dari pada merugikan, seperti kegiatan pembakaran yang dirancang untuk

---

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/ Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, Pasal 1 ayat (2).

<sup>49</sup> FAHUTAN IPB, "Sekilas tentang Kebakaran Hutan", <https://fmssc.lk.ipb.ac.id/2016/01/21/sekilas-tentang-kebakaran-hutan/> (diakses pada 20 desember 2020)

<sup>50</sup> Suratmo et all, "Pengetahuan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan", (Bogor: Fakultas Kehutanan IPB, 2003), h. 62.



memerangi gulma, serangan hama dan penyakit yang berbahaya bagi kehidupan manusia.

b. Pembakaran tak terkendali

Pembakaran yang tidak terkendali, yaitu kebakaran jenis ini disebabkan oleh kelalaian orang yang tidak mengikuti aturan tata cara pembakaran yang terkendali. Kegiatan ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kejadian pembakaran tak terkendali ini sering dijumpai pada saat ini.

c. Kebakaran Liar

Kebakaran liar mengacu pada api apapun yang tidak direncanakan atau dikendalikan. Dalam hal ini api harus dipadamkan karena bersifat merusak, sangat merugikan dan relatif sulit dikendalikan. Jika terjadi kebakaran di tanah mineral, maka waktu pembakaran akan lebih singkat dibandingkan dilahan gambut.<sup>51</sup>

Menurut Brown dan Davis (1973), Kebakaran hutan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe, antara lain :

a. Kebakaran bawah (*Ground Fire*)

Jenis kebakaran ini biasanya mengkonsumsi bahan bakar dasa berupa bahan organik di atas tanah atau di bawah lantai hutan (*Ground Fuels*) . Kebakaran bawah ini sulit dideteksi dan menyebar dengan sangat lambat tidak terpengaruh oleh kecepatan angin. Tanda terbakar yaitu asap putih yang keluar dari tanah, karena berada di bawan tanah, maka banyak pohon mati karena akarnya hangus terbakar.

---

<sup>51</sup> Manggala Agni , "Modul Pelatihan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan",  
[http://simerbela.com/images/mov\\_dok/1573543070Bahan%20Ajar%20\(MODUL\)%20Manggala%20Agni-ilovepdf-compressed.pdf](http://simerbela.com/images/mov_dok/1573543070Bahan%20Ajar%20(MODUL)%20Manggala%20Agni-ilovepdf-compressed.pdf). (diakses pada 20 desember 2020)

b. Kebakaran permukaan (*Surface Fire*)

Kebakaran permukaan yaitu kebakaran yang mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di lantai atau permukaan hutan baik berupa serasah, ranting-ranting tumbang, batang pohon di lantai hutan, semak-semak, dan sebagainya yang berada di bawah tajuk pohon dan di atas permukaan tanah.

c. Kebakaran Tajuk

Kebakaran tajuk biasanya berpindah dari satu ke tajuk lainnya dengan cara memakan bahan bakar yang berada pada tajuk pohon baik berupa daun, cangkang biji, ranting bagian atas pohon, tajuk pohon. Kebakaran tersebut menewaskan banyak petugas pemadam kebakaran karena tertimpa oleh ranting-ranting terbakar oleh kebakaran hutan, ditambah lagi banyak orang yang terjebak karena dikepung api dan asap.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor ulah manusia dan faktor alam.

a. Faktor Ulah Manusia

1) Faktor dorongan ekonomi

Keserakhahan manusia dalam penggunaan lahan berdampak serius terhadap keberlanjutan perlindungan lingkungan. Dengan berjalannya waktu pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia semakin melampaui batas normal. Dalam konteks beberapa orang tidak bertanggung jawab, manusia tidak akan pernah merasa telah cukup dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh, semua yang mereka inginkan, bukan hanya hal-hal yang perlu. Salah satu penggunaan yang

mengganggu keseimbangan ekosistem adalah pembukaan lahan pertanian dan penanaman dengan melakukan pembukaan hutan.<sup>52</sup>

Resiko kebakaran hutan semakin meningkat dengan adanya konversi dari hutan alam menjadi hutan tanaman dan perkebunan. Hal ini karena untuk menebang lahan hutan menjadi lahan yang bisa ditanami pengusaha menggunakan sistem tebas dan bakar karena relatif murah.<sup>53</sup>

## 2) Kelalaian Manusia

Karena kelalaian manusia kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi. Pembakaran yang disengaja adalah hasil dari pembakaran buatan untuk tujuan tertentu. Seperti membuang puntung rokok sembarangan, api perburuan, api perkemahan dan lain-lain.

### b. Faktor Alam

#### 1) Pengaruh El-Nino (ENSO)

Faktor alam yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan yaitu kekeringan alami akibat fenomena El-Nino (ENSO) yang turut mempengaruhi merebaknya kebakaran lahan di kawasan tersebut karena lahan lebih mudah terbakar.

Faktor cuaca (seperti suhu, kelembaban, curah hujan, angin, dan stabilitas udara) secara langsung mempengaruhi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. Faktor lain seperti musim kemarau yang lebih

---

<sup>52</sup> Risma Sari Septianingrum, “ Dampak Kebakaran Hutan di Indonesia Tahun 2015 dalam Kehidupan Masyarakat”, <https://www.researchgate.net/publication/> (diakses pada 1 desember 2020), h.5

<sup>53</sup> Informasi Institut Studi Arus Informasi (1999) yang dikutip Wardani (2004) menunjukan bahwa biaya pembersihan lahan dengan sistem *slash and burn* berkisar Rp 250.000-Rp 400.000 per hektar dibandingkan cara membersihkan lahan tanpa membakar yang berbiaya Rp. 1.200.000 – Rp. 2.000.000 per hektar.

panjang juga dapat mempengaruhi pengeringan bahan bakar sehingga baik jangka pendek maupun jangka panjang secara tidak langsung mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan.<sup>54</sup>

Selain fenomena alam di atas, masih banyak lagi fenomena alam lain yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan, seperti letusan gunung berapi, sambaran petir dan singkapan lapisan batu bara.

### 3. Dampak yang ditimbulkan dari Kebakaran Hutan

Terjadinya kebakaran hutan menimbulkan banyak sekali dampak dan kerugian. Berikut dampak-dampak kebakaran hutan yaitu :

#### a. Dampak Kesehatan Masyarakat

Kebakaran hutan seringkali menimbulkan bencana kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat.<sup>55</sup> Bahaya utama yang disebabkan oleh kebakaran hutan adalah produksi asap dan adanya partikel. Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan berdampak pada kesehatan masyarakat berupa penyakit terkait pernafasan, seperti ISPA, pneumonia, asma, iritasi mata dan iritasi kulit.

Akibat pembakaran bahan organik yang tidak sempurna di hutan dan lahan (sampah, sisa tanaman, dll.), Polusi asap dari kebakaran hutan mengandung campuran gas, partikel dan bahan kimia. Campuran gas, partikel dan bahan kimia yang terkandung dalam asap

---

<sup>54</sup> Ati Dwi Nurhayati, "Penyebab Kebakaran Hutan di Kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat, Jawa Barat". Jurnal Silvikultur Tropika, Vol. 19 No 03 (Desember 2019), h 175

<sup>55</sup> Loade Muhammad Fathun, "Bencana Hutan dalam Hubungan Internasional". Andalas Journal of International Studies, Vol 5 No 1 (Mei tahun 2016), h.85

memiliki banyak pengaruh bagi kesehatan. Dalam jangka pendek, asap kebakaran hutan bisa mengiritasi mata, hidung dan tenggorokan. Biasanya hal ini menimbulkan gejala seperti sakit mata dan robek, hidung teriritasi, gatal dan sakit tenggorokan, yang dapat mendorong terjadinya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Dampak merugikan ini mengancam kesehatan semua orang, terutama bayi dan anak-anak yang lebih mungkin terpapar dan terjangkit penyakit kesehatan akibat kabut asap yang dibawa oleh kebakaran hutan dan lahan.

b. Dampak Sosial Budaya Masyarakat

Kabut asap akibat kebakaran hutan berdampak serius pada kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kebakaran hutan dan lahan gambut. Asap akibat kebakaran hutan otomatis akan mengganggu berbagai aktivitas manusia sehari-hari, terutama bagi mereka yang berada di luar ruangan. Terbatasnya aktivitas di luar ruangan disebabkan oleh jarak pandang yang terbatas akibat asap. Karena tingginya risiko kecelakaan, kabut tebal juga mengganggu lalu lintas.

Terganggunya aktivitas manusia akibat kebakaran hutan juga mempengaruhi produktivitas dan pendapatan. Saat asap menyebar, kegiatan perdagangan dan sekolah di sekitar area kebakaran harus dihentikan dan ditutup. Hal ini melemahkan kegiatan ekonomi banyak orang berpenghasilan rendah dan mendorong mereka lebih jauh ke dalam kemiskinan. Kerugian ini disebabkan terhentinya semua kegiatan ekonomi selama jangka waktu tertentu.

Hilangnya mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar kebakaran hutan dan lahan gambut juga mengakibatkan mata pencaharian keluarga kurang mampu atau keluarga kelas bawah menjadi semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi

mereka yang menggantungkan mata pencaharian mengolah hasil hutan, pembakaran hutan menyebabkan hilangnya wilayah kerja (mata pencaharian). Bahkan kabut asap telah menyebabkan perekonomian di sektor perdagangan mengalami stagnasi. Dikarenakan kurangnya atau kurangnya konsumen untuk melakukan aktivitas perdagangan, banyak pedagang yang tidak melakukan aktivitas perdagangan.

c. Dampak Ekonomi Negara

Pemadaman lahan yang sangat susah dilakukan, membuat anggaran yang dikeluarkan pemerintah semakin besar. Bahkan hujan buatan dengan dengan pemberian garam pada awan yang diprediksi dapat terjadi kebakaran tidak sesuai target prediksi karena pengaruh faktor kecepatan angin dan iklim yang mudah berganti secara tiba-tiba.

Banyak kerugian ekonomi yang menimbulkan dampak tidak langsung, seperti di sektor transportasi darat, laut, dan udara, gangguan lalu lintas utama disebabkan oleh gangguan jarak pandang, yang mempengaruhi keselamatan perjalanan.<sup>56</sup> Dampaknya terhadap pertumbuhan pendapatan daerah akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

d. Dampak Kebakaran Hutan terhadap Flora dan Fauna

1) Kerugian Ekologis akibat kebakaran hutan

Hutan hujan tropis yang utuh memiliki fungsi untuk menjaga kesuburan tanah, mengatur tata air, dan menjadi habitat hewan. Jika hutan terbakar, sebagian fungsi hutan akan hilang

---

<sup>56</sup> Anih Sri Suryani, Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan Di Wilayah Perbatasan Indonesia, Jurnal Aspirasi Vol. 3 No. 1, (18 Juni 2012) h.65

sebagian atau seluruhnya, yang sejalan dengan hilangnya pohon di hutan.<sup>57</sup>

Mac Kinnon mengatakan, kebakaran hutan kemungkinan mengganggu lima proses ekologi hutan yaitu suksesi alami, produksi bahan organik dan proses dekomposisi, siklus unsur hara, siklus hidrologi, dan pembentukan tanah. Kebakaran hutan juga dapat merusak fungsi hutan sebagai pengatur iklim dan penyerap karbon. Selain itu, kebakaran hutan dapat merusak Daerah Aliran Sungai (DAS).

Hutan yang terbakar parah akan sulit dipulihkan karena struktur tanahnya sudah rusak. Hilangnya vegetasi akan membuka lahan sehingga rentan terhadap erosi dan tidak tahan banjir. Karenanya, setelah hutan terbakar banjir sering terjadi pada musim hujan di daerah yang hutannya terbakar.

## 2) Dampak kebakaran hutan terhadap Fauna

Kebakaran hutan menyebabkan hilangnya satwa liar. Kebakaran hutan seringkali merugikan dan membunuh satwa liar. Selain itu dampak kebakaran hutan terhadap satwa liar adalah perubahan tempat berlindung. Tempat perlindungan dapat menahan musuh alami, predator, dan sinar matahari. Bergantung pada tingkat keparahan kebakaran, habitat dari dapat hancur, atau strukturnya dapat mengalami perubahan drastis, yang menyebabkan hilangnya spesies satwa liar di area yang terbakar.

## e. Hubungan Bilateral dengan Negara Tetangga

---

<sup>57</sup> Bambang Hero Saharjo, et. al, "*Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Komunitas Terdampak Asap*". (Bogor: Institut Pertanian Bogor 2018) h.28



Kebakaran hutan dan lahan gambut di beberapa wilayah di Indonesia merupakan masalah serius baik di dalam negeri maupun Internasional. Kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap di Indonesia dapat menjadi bencana global yang membutuhkan penanganan khusus dari berbagai aspek. Masyarakat Indonesia tidak hanya merasakan dampak dari kebakaran hutan tersebut, namun beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura juga merasakan dampak dari kebakaran hutan tersebut. Dengan bantuan angin, Kabut asap menjadi mudah terbang ke negara lain dan menjadi polusi udara lintas batas. Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga dalam aspek lain membuat kegiatan perekonomian terganggu.<sup>58</sup>

#### 4. Sanksi terhadap Pelaku Pembakaran Hutan

Perumusah delik lingkungan berhubungan dengan sanksi pidana, sebab secara teoritik, sanksi pidana ini bertujuan untuk menegakkan atau memastikan kepatuhan terhadap norma hukum lingkungan. Sanksi pidana ini merupakan tanggapan atas pelanggaran terhadap hukum dan peraturan lingkungan.<sup>59</sup> Sebagai tindak pidana kejahatan maka sanksi pidana meliputi kurungan, denda, dan sanksi disiplin. Hukuman penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perilaku dan konsekuensinya.<sup>60</sup>

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan sudah diatur dalam undang-undang. Sebab dalam

---

<sup>58</sup> Nisrina Bilqis, "Analisis Dampak Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia Terhadap Hubungan Diplomati Indonesia dengan Malaysia dan Singapura", *Journal of Government and Political Studies*, Vol 3 No. 2 (Oktober 2020) h.56

<sup>59</sup> Muhammad Akib, "Hukum Lingkungan", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011) h.165

<sup>60</sup> Tirza Sisilia Mukau, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan atau Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Lex Crimen* Vol. V No. 4 (Juni 2016)

hukum yang berlaku, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku memiliki beberapa bentuk sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berikut Undang-Undang yang mengatur tentang sanksi pelaku pembakaran Hutan yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 199 Tentang Kehutanan
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Kebakaran hutan atau kebakaran lahan juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan sehingga dapat dikenakan sanksi oleh UU PPLH, sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbuatan yang menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau baku kerusakan lingkungan hidup. Secara normatif substansi Pasal 98 memuat 3 ayat.
  - a) Rumusan pasal 98 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air , baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah)

dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".<sup>61</sup>

Unsur subjektif pada pasal ini yaitu setiap orang dan dengan sengaja. Yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah perseorangan atau badan hukum, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

b) Pasal 98 ayat (2) UUPPLH menjelaskan bahwa :

"Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 98 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/ atau bahaya kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)".<sup>62</sup>

Substansi Pasal 98 ayat (2) pada dasarnya sama dengan Pasal 98 ayat (1), dan keduanya merupakan delik materil. Perbedaannya yaitu konsekuensi dari tindakan pelakunya. Akibat pada pasal 98 ayat (1) yaitu lingkungan hidup, sedangkan akibat dalam pasal 98 ayat (2) adalah cidera diri dan/ atau membahayakan kesehatan manusia.

c) Jika tindakan pelaku mengakibatkan seseorang terluka parah atau meninggal dunia, ancaman sanksi pidana juga akan meningkat. sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (3) UUPPLH yang berbunyi :

"Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat

---

<sup>61</sup> Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Pasal 98 ayat (1).

<sup>62</sup> *Ibid* , Pasal 98 ayat (2).

atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)".<sup>63</sup>

2) Kelalaian menyebabkan terlampauinya baku mutu ambien, baku

mutu air, baku mutu air laut atau baku kerusakan lingkungan.

a) Pasal 99 juga memiliki 3 ayat.

Sebagaimana Pasal 99 ayat (1) mengatur sebagai berikut :

"Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".<sup>64</sup>

b) Pasal 99 ayat (2) UUPPLH :

"Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar

---

<sup>63</sup> *Ibid* , Pasal 98 ayat (3).

<sup>64</sup> *Ibid*, Pasal 99 ayat (1).

rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)".<sup>65</sup>

c) Pasal 99 ayat (3) UUPPLH :

"Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)".<sup>66</sup>

Selain sanksi pidana dan denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana Tata tertib karena Pembakaran Hutan diatur sebagaimana dirumuskan pada Pasal 199 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu :

- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- d. Perbaikan akibat tindak pidana
- e. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/ atau
- f. Penempatan perusahaan dibawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun".<sup>67</sup>

2. Sanksi membakar hutan berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 78 ayat (3) :

<sup>65</sup> *Ibid*, Pasal 99 ayat (2).

<sup>66</sup> *Ibid*, Pasal 99 ayat (3).

<sup>67</sup> *Ibid*, Pasal 199

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 ( Lima Milyar Rupiah)”.<sup>68</sup>

Pasal 78 ayat (4) :

“Barang siapa karna kelalaian nya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, dianca dengan pidana adalah penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”.<sup>69</sup>

3. Sanksi pidana membakar berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Pasal 56 ayat (1) :

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

Pasal 108:

“Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.<sup>70</sup>

4. Sanksi Pidana menimbulkan kebakaran berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 187 KUHP :

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 78 ayat (3).

<sup>69</sup> *Ibid*, Pasal 78 ayat (4).

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 108.

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam :

- 1) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang:
- 2) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain,
- 3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati”.<sup>71</sup>

Pasal 189 KUHP :

“Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membuat tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalangi-menghalangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.<sup>72</sup>

#### **D. Perihal Polisi Kehutanan**

##### **1. Pengertian Polisi Kehutanan**

Polisi kehutanan merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab menjaga hutan dari bahaya kerusakan hutan. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan hutan menyebutkan pengertian polisi kehutanan adalah “Pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang

<sup>71</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 187.

<sup>72</sup> *Ibid*, Pasal 189.



diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”.<sup>73</sup>

Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) pada Pasal 1 Ayat (15) menyebutkan "Polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi Kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan".<sup>74</sup> Sistem satuan komando yang disebutkan dalam ketentuan umum tentang definisi polisi kehutanan adalah bentuk organisasi satuan komando kepolisian bersifat fungsional berjenjang. Hanya dalam satu hierarki pemerintahan, sistem satuan komando Polhut dapat diterapkan.<sup>75</sup>

Polisi kehutanan terdiri atas :<sup>76</sup>

#### 1) Polhut Pembina

Polhut pembina yaitu pejabat struktural tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai

dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.

#### 2) Polhut Fungsional

---

<sup>73</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan hutan, Pasal 1 ayat (2)

<sup>74</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) , Pasal 1 ayat (15)

<sup>75</sup> Hermanus Ridholof, Kewenangan Polisi Kehutanan dalam bidang Perlindungan Hutan Pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah, e Jurnal Katalogis Vol 4 Nomor 5 (Mei 2016) h.201

<sup>76</sup> Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.75/Menhut-II/2014, Pasal 3 ayat (1)

Polhut fungsional yaitu pegawai negeri sipil dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang diangkat sebagai pejabat fungsional polisi kehutanan.

### 3) Polhut Perhutani

Polhut perhutani yaitu pegawai dalam lingkungan perusahaan umum perhutani yang diangkat sebagai polisi kehutanan oleh direksi.

## 2. Tugas dan Fungsi Polisi Kehutanan

### a. Tugas Polisi Kehutanan

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polhut dan Angka kreditnya menyebutkan "Tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan".<sup>77</sup>

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan menyebutkan bahwa , "Tugas dan fungsi Polisi Kehutanan adalah :

1. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar dan
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar,

---

<sup>77</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, Pasal 4

investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan."<sup>78</sup>

b. Fungsi Polisi Kehutanan

Fungsi polisi kehutanan yaitu :

- 1) Menjaga keutuhan batas hutan,
- 2) Polisi hutan berperan melarang warga dalam pengerjaan di lahan hutan tanpa izin dan wewenang yang sah,
- 3) Polisi hutan berperan melarang mengoperasikan lahan hutan secara ilegal untuk menghindari kerusakan pada lahan,
- 4) Polisi hutan berperan melarang penebangan yang tidak sah (tidak memiliki izin),
- 5) Polisi hutan berperan melarang pemungutan hasil hutan dan perburuan binatang liar tanpa izin,
- 6) Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan, dan melarang pembakaran hutan tanpa izin resmi.
- 7) Polisi hutan berperan melarang merumput atau memungut rumput dan hasil hutan lainnya yang serupa dengan pakan ternak dan perburuan satwa liar tanpa izin, kecuali terdapat kawasan yang disebabkan untuk itu,
- 8) Mencegah dan mengatasi kerusakan hutan dan hasil hutan disebabkan daya alam, hama dan penyakit,
- 9) Polisi hutan berperan melarang membawa alat-alat yang lazim digunakan memotong dan membelah pohon di kawasan hutan ,
- 10) Polisi hutan berperan mencegah perusakan sumber daya alam hayati dan lingkungan,

---

<sup>78</sup> Peraturan Menteri Kehutanan No.P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan, Pasal 4 ayat (1)

- 11) Polisi hutan berperan mencegah terjadinya kerusakan terhadap bangunan-bangunan dalam rangka upaya konservasi tanah dan air.<sup>79</sup>



---

<sup>79</sup> Abdul Khakim. 2005. "Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia". (Bandung : PT Citra Adhya Bakti), h.165.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'anul Karim**

RI, Departemen, Agama. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2007

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan (P3H)

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian

Kebakaran Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan No.P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## Buku

- Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014.
- Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adityoso Wignyo, *Manajemen Bencana Pengantar & Isu-Isu Strategis*, Jakarta: umi Aksara, 2018.
- Bambang Hero Saharjo, et. al, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Komunitas Terdampak Asap*, Bogor: Institut Pertanian Bogor 2018.
- Djarwanto, *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Liberty, Yogyakarta: 1984.
- Iqrom Pahrizal, *Reformasi Birokrasi di Nusantara*, Malang: UB Press, 2013.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.
- Khakim, Abdul, "Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia", Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia 1985.
- Latupono Barzah, et. al. *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta : Deepublish, 2017.
- Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko , *Analisis Sosial Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi*, Bandung : Yayasan Akatiga, 2006.
- Madiong Baso, *Hukum Kehutanan Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hukum Berkelanjutan*, Makassar : Celebes Media Perkasa , 2017.
- M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", Volume 10 , Jakarta : Lentera Hati, 2002.

- Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta : Sinar Grafika ,1997.
- San Afri Awang,. *"Politik kehutanan masyarakat"*, Yogyakarta: Center for Critical Social Studies & Kreasi Wacana Yogyakarta , 2003.
- Setia Zein Alam, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta: Rineka Cipta,1997.
- Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara,1991).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* , Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suratmo et all, *Pengetahuan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan*, Bogor: Fakultas Kehutanan IPB,2003.
- Soebardhy, et. al. *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, Jawa Timur: CV Qlara Media, 2020.
- Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Soeranto. Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: STIM YKPN,2008.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Sukarame: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Zuriah Nurul , *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

## **Jurnal**

- Anih Sri Suryani, "Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan Di Wilayah Perbatasan Indonesia", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 3 No. 1, Juni 2012.
- Ati Dwi Nurhayati, "Penyebab Kebakaran Hutan di Kawasan Hutan Pendidikan



Gunung Walat, Jawa Barat", *Jurnal Silvikultur Tropika*, Vol. 19 No 03, Desember 2019.

Facmi Rasyid. "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan", *Jurnal Lingkar Widyaiswara* , Juni 2020.

Hermanus Ridholof, "Kewenangan Polisi Kehutanan dalam bidang Perlindungan

Hutan Pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah", *e Jurnal Katalogis*, Vol 4 Nomor 5, Mei 2016.

Loade Muhammad Fathun, "Bencana Hutan dalam Hubungan Internasional". *Andalas Journal of International Studies*, Vol 5 No 1, Mei tahun 2016.

Nisrina Bilqis, "Analisis Dampak Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia Terhadap

Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan Singapura", *Journal of Government and Political Studies*, Vol 3 No. 2, Oktober 2020.

Tirza Sisilia Mukau, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran

Hutan atau Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Lex Crimen*, Vol. V No. 4, Juni 2016.

### **Sumber Online**

Berita Harian Lampost."Kebakaran Hutan Selama Kemarau 2019 capai 2607 ha",

tersedia di: <https://www.google.co.id/amp/s/m.lampost.co/amp/kebakaran-hutan-selama-kemarau-2019-capai-2-607-ha.html>  
(diakses 24 juni 2020).

Buletin Konservasi Kepala Burung Balai Besar KSDA Papua Barat "Kebakaran "Hutan Sebuah Ancaman Bagi Kelestarian Sumber Daya Alam", tersedia di:[http://idid.facebook.com/note.php?note\\_id=121726427895170&comments](http://idid.facebook.com/note.php?note_id=121726427895170&comments). (Diakses 24 Juni 2020).

FAHUTAN IPB, "Sekilas tentang Kebakaran Hutan" tersedia di :  
<https://fmisc.lk>.

[ipb.ac.id/2016/01/21/sekilas-tentang-kebakaran-hutan/](http://ipb.ac.id/2016/01/21/sekilas-tentang-kebakaran-hutan/) (diakses pada 20 desember 2020)

Jeni Fitria, *Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang*

*Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam*,  
(Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2017)

Manggala Agni , "Modul Pelatihan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan dan

Lahan", [http://simerbela.com/images/mov\\_dok/1573543070Bahan%20Ajar%20\(MODUL\)%20Manggala%20Agni-ilovepdf-compressed.pdf](http://simerbela.com/images/mov_dok/1573543070Bahan%20Ajar%20(MODUL)%20Manggala%20Agni-ilovepdf-compressed.pdf). (diakses pada 20 desember 2020)

Nurfatihah Amira Wi, *Analisis Kinerja Polisi Hutan Dalam Perlindungan Hutan*

*Di Kabupaten Sinjai*, (Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin Makasar: 2017)

Risma Sari Septianingrum, " Dampak Kebakaran Hutan di Indonesia Tahun 2015 dalam Kehidupan Masyarakat, <https://www.researchgate.net/publication/> (diakses pada 1 desember 2020)

M.tribunnews.com. "Akibat Putung Rokok 100 hektare lahan di Lampung Barat

terbakar"

<https://www.google.co.id/amp/s/m/tribunnews.com/amp/kilas-daerah/2019/09/08/breaking-news-akibat-puntung-rokok-100-hektare-lahan-di-lampung-barat-terbakar> (diakses 24 juni 2020).

Larangan Merusak Hutan dalam Perspektif Al-Qur'an, tersedia di :  
[https://kmnu.](https://kmnu.or.id/larangan-merusak-hutan-dalam-perspektif-al-qur/)

[or.id/larangan -merusak-hutan-dalam-perspektif-al-qur/](https://kmnu.or.id/larangan-merusak-hutan-dalam-perspektif-al-qur/) (diakses pada  
20 desember)

Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung, Tersedia di  
[Sipongi.menlhk.go.id](http://Sipongi.menlhk.go.id), (diakses 24 juni 2020)

Redaksi Ilmu Geografi. "Hutan berdasarkan Iklim" tersedia di  
[Ilmugeografi.com](http://Ilmugeografi.com), (diakses 21 desember 2020)

Website resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng Sejahtera, mandiri,  
Integrasi,

lestari, Etika. <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/jenis-jenis-hutan-dan-fungsinya-60> , (diakses 21 desember 2020)

### **Wawancara**

Din Hanipur, Wawancara dengan penulis, Dinas Kehutanan Provinsi  
Lampung, Bandar Lampung, 13 Januari 2021.

Raya Fitri, Wawancara dengan penulis, Dinas Kehutanan Provinsi  
Lampung, Bandar Lampung, 13 Januari 2021.

Marju, Wawancara dengan penulis, Dinas Kehutanan Provinsi  
Lampung, Bandar Lampung, 13 Januari 2021.

Amirsyah, Wawancara dengan penulis, Dinas Kehutanan Provinsi  
Lampung, Bandar Lampung, 13 Januari 2021.

Febriana Rohardiana, Wawancara dengan penulis, Dinas Kehutanan  
Provinsi Lampung, Bandar Lampung, 15 Januari 2021.

Bidara Sinta, Wawancara dengan penulis, Dinas Kehutanan Provinsi  
Lampung, Bandar Lampung, 15 Januari 2021.